



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PPKM DARURAT DI KABUPATEN GARUT

Hafadh Furqan^{1,2,5}; Theresia Febrian Sinaga^{1,3}; Jioanda Riza Nugraha^{1,4}

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan

³Pemerintah Kabupaten Simalungun

⁴Pemerintah Kabupaten Pasaman

⁵corresponding author: 31.0014@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic is increasing throughout Indonesia. Due to this, the handling of covid-19 is very important to do to overcome the spread of the covid-19 virus because if there is no handling of this virus it will endanger public health. As we know COVID-19 can cause mild to severe symptoms. There are about 80% of mild symptoms (runny nose, sore throat, cough, and fever) that do not require special treatment but there are also people who suffer from severe symptoms, such as with pneumonia or difficulty breathing, which usually appear gradually. One of the efforts to deal with COVID-19 is to implement the PPKM (Enforcement of Community Activity Restrictions) policy. None other than the goal is to foster public compliance with health protocols, prevent covid-19, and suppress the spread of COVID-19, so that the tourism and creative economy sector (tourism and creative economy) will bounce back and the economic sector will recover soon. Garut Regency is one of the regencies in Indonesia that also applies this PPKM regulation. This is the background of the author to examine the participation of the people of Garut Regency during the implementation of PPKM in an effort to handle COVID-19. This study aims to find out how the role of the people of Garut Regency and what changes occur during the implementation of PPKM in Garut Regency. The research method used is a literature study by elaborating research that is relevant to the concept of empowering local communities. In one related study, it was stated that community participation in the implementation of emergency PPKM in Garut Regency showed significant results. Therefore, through this program-based idea, we are able to achieve optimal implementation of emergency PPKM so as to increase the health status as high as possible.

Keywords: Covid-19, Community Participation, PPKM, Health protocol

ABSTRAK

Masa pandemi Covid-19 terus saja meningkat di seluruh Indonesia. Disebabkan dari hal tersebut, penanganan covid-19 adalah hal yang sangatlah penting wujudkan untuk menghabiskan penyebaran virus covid-19 karena jika tidak dilakukan penanganan virus ini akan berdampak dan membahayakan Kesehatan seluru masyarakat. Dari yang kita tahu

covid-19 yang dapat membuat gejala ringan hingga berat. Terdapat juga sekitar 80% gejala ringan seperti (pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam) yang tidak memerlukan perawatan khusus tetapi ada juga orang yang menderita gejala berat, contohnya disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Salah satu upaya penanganan covid-19 ini yaitu dengan menerapkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, pencegahan covid-19, dan menekan angka penyebaran COVID-19, sehingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kembali bangkit dan sektor ekonomi segera pulih. Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang juga menerapkan peraturan PPKM ini. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti partisipasi masyarakat Kabupaten Garut saat pelaksanaan PPKM dalam upaya penanganan covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat Kabupaten Garut dan perubahan apa saja yang terjadi selama pelaksanaan PPKM di Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengelaborasi penelitian yang relevan dengan konsep pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam salah satu penelitian terkait terdapat bahwa partisipasi masyarakat akan pelaksanaan PPKM darurat di Kabupaten Garut memperlihatkan hasil kalau signifikan. . Jadi, melalui gagasan berbasis program ini mampu mencapai pelaksanaan PPKM darurat yang optimal sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Kata Kunci: Covid-19, Partisipasi Masyarakat, PPKM, Protokol kesehatan

PENDAHULUAN

Wabah Covid-19 ini telah menjadi pandemi global yang dimana diumumkan oleh *World Health Organization* (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat sehingga membuat Covid-19 ini menjadi topik utama di seluruh penjuru dunia. Tentunya di Indonesia sendiri jumlah masyarakat yang terinfeksi virus Corona mengalami sebuah peningkatan dari hari ke hari. Pada 9 Agustus 2021, Pemerintah Indonesia telah mendapatkan 3.686.740 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan ada 108.571 kematian terkait COVID-19 yang dilaporkan dan 3.129.661 pasien sudah pulih dari penyakit tersebut. Garut adalah salah satu dari sekian banyak kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki beberapa kasus Covid-19. Diantaranya dilansir dari data pemantauan Covid-19 Kabupaten Garut, pada tanggal 9 Agustus 2021 sendiri total kasus terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 25.866 orang, 22.011 orang sembuh, dan 1.129

orang dinyatakan meninggal dunia akibat pandemi ini.

Menurut demografi, luas wilayah administratif Kabupaten Garut sebesar 306.519 Ha (3.065,19 km²) terdiri atas 42 kecamatan, 41 kelurahan, dan 424 desa . Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Garut sebanyak 2.284.418 jiwa, terdiri dari 1.116.089 jiwa perempuan dan 1.168.329 jiwa laki-laki.

Pemerintah Kabupaten Garut sudah melakukan upaya dan kebijakan kesehatan untuk mencegah penularan tersebut. Salah satu kebijakannya adalah peraturan PPKM. Pada PPKM Mikro Darurat di Kabupaten Garut dilaksanakan penyekatan di beberapa titik oleh aparat dari Polisi, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut. Kegiatan masyarakat Kabupaten Garut mulai dibatasi oleh pemerintah. Petugas gabungan bersiaga mencegah kerumunan dan mengintensifkan pemantauan protokol kesehatan masyarakat. Pembatasan kegiatan dilakukan dengan cara melakukan

penyekatan jalanan yang menuju ke pusat perkotaan. Dan juga, Pemda juga menutup akses kawasan wisata sampai 20 Juli 2021.

Aturan yang berlaku pada PPKM mikro ini dirasa lebih longgar daripada PPKM Darurat. Yang dimana jumlah pekerja yang boleh bekerja dari kantor (*work from office*) sebanyak 50 persen dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, sisanya bekerja dari rumah (*work from home*). Selain itu, pusat perbelanjaan atau mal wajib tutup pukul 21.00 tanpa toleransi, di mana aturan sebelumnya disebutkan bahwa mal boleh beroperasi sampai pukul 20.00. Untuk restoran atau tempat makan, kapasitas makan di tempat atau dine-in maksimal 50 persen. Jam operasional restoran hanya dapat berlaku sampai pukul 21.00. Sementara, untuk tempat ibadah juga dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas maksimum. Kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100 persen dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan selama PPKM mikro kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara daring.

Dari sisi melaksanakan penyekatan, aparat juga melakukan patroli ke beberapa tempat yang dianggap mengundang kerumunan. Dalam melakukan penyekatan, sistem tiga lapis akan diterapkan petugas. Ada penyekatan di tiga ring. Ring tiga, ring dua dan satu. Sistem penyekatan berlapis dibagi sesuai peta kerawanan dan pusat kerumunan. Wilayah Jalan Ahmad Yani atau Pengkolan merupakan salah satu wilayah yang diterapkan pembatasan ketat karena titik itu merupakan pusat keramaian warga Garut. Di awal pemberlakuan PPKM ini lebih menekankan edukasi kepada masyarakat. Tindakan preventif lebih dikedepankan. Petugas kesehatan juga mengadakan pengambilan sampel usap pengendara saat tes cepat antigen Covid-19 *drive thru* di Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dinas Perhubungan Kabupaten Garut menggelar tes cepat antigen gratis bagi pengendara luar daerah

yang masuk ke Kabupaten Garut selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran COVID-19.

Namun demikian, kalau ada pelanggaran, akan ada operasi serangkaian tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penindakan atas dugaan pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung unsur Pidana yang akan di lakukan bersama instansi lain. Dalam penerapannya pihak berwenang akan memutarbalikkan kendaraan dari luar Garut yang akan memasuki wilayah Kabupaten Garut, namun bagi pengendara yang ber-KTP (Kartu Tanda Penduduk) asal Kabupaten Garut diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya.

Tujuan dari PPKM dengan mikro darurat antara lain merupakan yang pertama membatasi kegiatan masyarakat dari kerumunan. Yang kedua adalah melaksanakan penegakan daripada prokes. Yang ketiga, tetap dilakukan tracing, tracking dan vaksinasi. Jadi kesimpulannya sebagian besar masyarakat Garut dapat dibidang patuh terhadap peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis memberikan bahasan masalah dari karya tulis ini yang dimana adalah “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk mengurangi pandemi Covid-19 di Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan protokol kesehatan secara optimal”.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menjelaskan kepatuhan masyarakat Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan protokol kesehatan secara optimal dalam pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat); 2) Mengetahui teori perubahan perilaku terhadap

pengimplementasian protokol kesehatan melalui program PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada masyarakat Kabupaten Garut; 3) Mempelajari dan mengetahui hubungan antara teori perubahan perilaku, teori partisipasi masyarakat, dan gagasan berbasis program PPKM guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengimplementasikan protokol kesehatan secara optimal di Kabupaten Garut

KAJIAN TEORI

1. Teori Kebijakan

Definisi kebijakan menurut Friedrich dalam Agustino, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sehubungan dengan kebijakan Anderson dalam Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan: *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut

tentang masalah yang dihadapi lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya.

2. Teori Perubahan Perilaku

Model perilaku ABC merupakan suatu model perubahan perilaku yang terdiri dari *Antecedent*, *Behavior*, dan *Consequence* yang digunakan untuk mensosialisasikan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. *Antecedent* adalah sesuatu yang datangnya lebih dahulu sebelum terjadi perilaku atau *behavior*. *Antecedent* merupakan pemicu suatu perilaku atau alasan seseorang berperilaku seperti itu. *Consequence* adalah sesuatu yang mengikuti perilaku atau akibat dari perilaku yang dilakukan.

The lawfulness of behavior dalam ilmu perilaku yang disampaikan oleh As'ad. Beliau mengemukakan bahwa tingkah laku manusia timbul karena adanya stimulus. Semakin besar stimulus yang ada maka semakin besar kemampuannya untuk menggerakkan tingkah laku.

Penggunaan model perilaku ABC merupakan upaya efektif untuk memahami sebab terjadinya perilaku dan cara meningkatkannya sesuai harapan. Hal ini dikarenakan adanya konsekuensi yang digunakan untuk memotivasi agar frekuensi dan desain intervensi dapat meningkatkan perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Dalam hal ini perilaku yang diharapkan frekuensinya meningkat ialah perilaku penerapan protokol kesehatan.

3. Teori Partisipasi Masyarakat

Virus Covid-19 telah masuk ke negara Indonesia terkhusus Provinsi Jawa Barat yang saat ini telah memasuki zona hitam. Hal ini tentu saja mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Garut. Dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus corona, pemerintah Kecamatan Garut melakukan berbagai upaya pencegahan. Seperti kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) diantaranya *physical distancing* atau jaga jarak, serta perintah untuk memakai masker dan membawa handsanitizer jika keluar rumah. Akan tetapi, hal ini masih kurang efektif karena partisipasi masyarakat di Kabupaten Garut belum berjalan secara optimal. Masih adanya beberapa masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam menerapkan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait pandemi ini. Berdasarkan hal tersebut, maka karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Selain pendapat diatas, Mulyadi menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu program, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program ada yang dapat mendukung keberhasilan suatu kebijakan atau bahkan ada juga sifatnya yang dapat menghambat keberhasilan suatu kebijakan. Angell mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal. Pemahaman terkait *physical distancing* melalui *work from home* (WHF) yang dicanangkan oleh pemerintah tingkat keberhasilannya tergantung pada faktor tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk mengetahui partisipasi

masyarakat yang sangat berpengaruh dalam penanggulangan Covid-19 ini.

4. Coronavirus dan Covid-19

Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo *Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae*. Terdapat empat genus yaitu *alpha coronavirus*, *beta coronavirus*, *delta coronavirus*, dan *gamma coronavirus*. Coronavirus memiliki kapsul, partikel berbentuk bulat atau elips, sering pleiomorfik diameter sekitar 50-200m .

Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dinaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56°C selama 30 menit, eter, alkohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu *Sars-CoV-2*, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.

METODE

Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan terkait partisipasi atau peran masyarakat yang dimana sebagai *role model* dalam usaha mengimplementasikan protokol kesehatan di Kabupaten Garut ini. Karya tulis ini mempunyai fokus pada analisis implementasi protokol kesehatan dengan optimal melalui program PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk masyarakat Kabupaten Garut. Didapatkan dari data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan instrumen berupa jurnal ilmiah, artikel ilmiah, E-Book, dan sumber internet. Data dilakukan seleksi dahulu dan juga dipisahkan dari data yang digunakan untuk mengintervensi bahasan yang dirumuskan. Data dirumuskan menjadi

konsep dasar pengaruh partisipasi masyarakat Kabupaten Garut dalam pelaksanaan protocol kesehatan PPKM darurat untuk mengurangi pandemi Covid-19 dengan cara melakukan analisis data dan peninjauan literatur. Data disusun dan ditinjau ulang konteksnya yang berkaitan dengan PPKM darurat yang selanjutnya akan diambil dan digunakan dalam kepenulisan karya tulis ilmiah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menangani penularan virus Covid-19 ini, masyarakat tidak lagi sebagai penonton dan melepaskan semua urusan tersebut pada pemerintah, akan tetapi diharapkan juga masyarakat turut aktif dan terlibat dalam penanganan virus ini. Dalam kasus ini, masyarakat dapat merasakan manfaat ketika terlibat dalam penanganan penyebaran Covid-19. Gagasan partisipasi masyarakat ini sama dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat, di mana anggota masyarakat memobilisasi diri mereka sendiri dan memegang tanggung jawab dalam penanganan Covid-19 ini.

Partisipasi dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Garut mempunyai hasil penelitian dibagi menjadi 4 tahap, yang dimana yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pengambilan manfaat. Keempat tahapan ini partisipasi masyarakat di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam Perencanaan

Hal yang penting dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan serta implementasi program ini yaitu suatu implementasi adanya dan kemauan yang dilakukan masyarakat dalam berkontribusi dan berkorban terhadap implementasi penanggulangan virus corona. Saat membuka suatu forum rapat yang memungkinkan beberapa dari masyarakat yang menjadi perwakilan

untuk berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan suatu keputusan perencanaan-perencanaan yang akan dilaksanakan dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Garut.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat bisa diketahui dari ikut sertanya masyarakat dalam mendirikan Posko *Panggeuing Corona* yang berada di setiap kecamatan di Kabupaten Garut. Di posko ini dilakukan pencegahan Covid-19 berupa pendataan serta pemantauan warga yang terpapar Covid-19, termasuk juga menghadapi kasus kematian warga sekitar akibat Covid-19. Posko ini didanai oleh APBD masing-masing desa yang dikoordinir oleh perangkat daerah yang ada di daerah tersebut. Dalam hal ini, gugus tugas Covid-19 beserta masyarakat Kabupaten Garut membagi tugas piket untuk bergantian berjaga di posko yang telah ditentukan.

Selain pemantauan dari posko penanganan Covid-19, masyarakat di Kabupaten Garut juga ikut serta dalam berbagai aktivitas pencegahan penularan Covid-19, yaitu:

1. Ikut serta mensosialisasikan mulai dari media maupun memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Media adalah sumber informasi yang sangat penting untuk mengetahui update terbaru terkait Covid-19. Apalagi sebagian masyarakat telah menggunakan teknologi sehingga masyarakat dapat lebih dimudahkan dengan adanya informasi dari media social. Untuk beberapa masyarakat yang belum menggunakan teknologi dapat melihat update terbaru melalui koran, baliho, atau diberikan edukasi secara langsung oleh keluarga dan masyarakat setempat agar seluruh warga di Kabupaten Garut memiliki pengetahuan dan lebih memahami tentang bahaya Covid 19 di daerah tersebut.

2. Memberi bantuan secara sukarela dan inisiatif yang mampu menimbulkan rasa peduli sesama masyarakat. Pada masa pandemi ini, banyak masyarakat Kabupaten Garut yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan berupa pembagian masker secara gratis, hand sanitizer, maupun penyemprotan disinfektan yang dilakukan di tempat ibadah, toko-toko pusat belanjaan, di tempat makan, dan tempat lain di Kabupaten Garut. Hal ini dilakukan secara sukarela oleh sebagian masyarakat Kabupaten Garut dengan harapan dapat mengurangi persentase Covid-19 di daerahnya.
3. Menerapkan Protokol Kesehatan. Protokol kesehatan merupakan kebijakan pemerintah yang harus ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Selain berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, masyarakat Kecamatan Jatiluhur juga berpartisipasi untuk menjaga diri sendiri, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan jika bepergian keluar rumah. Protokol kesehatan biasanya lebih dikenal dengan 3M , yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Hal ini bertujuan untuk menghindari tertularnya virus corona dari seseorang yang terjangkit virus corona baik yang memiliki gejala atau bahkan tanpa gejala.
4. Senantiasa bermukim di rumah. Lebih banyak menghabiskan waktu di rumah lebih baik pada masa pandemi ini karena dengan demikian dapat menghindari diri dari penularan virus corona di luar rumah. Seperti halnya yang telah ditetapkan pemerintah untuk melaksanakan *Work From Home* (WFH) dan juga Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi pelajar.

3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi sangat diperlukan, karena dengan demikian masyarakat dapat memantau kegiatan yang telah mereka lakukan, hingga tujuan bersama yang diharapkan dapat terwujud. Masyarakat saling memantau agar mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dari pemantauan yang dilakukan, akhirnya dapat membuahkan hasil, dan penyebaran covid-19 dapat diminimalisir. Selain itu evaluasi dilakukan secara berkala dipimpin oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Garut.

Tindakan evaluasi merupakan hal sangat penting, karena akan mengetahui perkembangan dan koreksi untuk segera ditindaklanjuti. Seperti yang dijelaskan oleh Theresia dkk. (2014), Pemantauan dan evaluasi program sangat penting, bukan saja agar tujuan dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan.

4. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat merupakan unsur penting tapi sering terlupakan. Manfaat dari pembuatan Posko tidak lain adalah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Garut yang terhindar dari penularan Covid-19. Pelaksanaan kegiatan serta control dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 sekarang bisa dirasakan manfaatnya, yaitu dengan terhindarnya penularan virus dari tetangga yang positif, adanya rasa empati antar masyarakat sehingga hubungan sosial tetap terjaga, dan adanya rasa yang memunculkan semangat untuk selalu berpartisipasi dalam program

penanggulangan Covid-19. Manfaat ini menunjukkan hal yang di rasakan oleh masyarakat Kabupaten Garut terhadap pengembangan pengetahuan yang lebih baik tentang masalah yang dihadapkan oleh masyarakat agar virus corona ini dapat terputus dan berakhir.

5. Kendala

Pada proses penerapan PPKM darurat pada masyarakat Garut tentunya memiliki beberapa kendala yang dimiliki Masyarakat dinilai memang sudah banyak yang disiplin untuk mengikuti Protokol Kesehatan namun ada beberapa juga masyarakat yang tentunya juga masih melanggar Sistem Protokol Kesehatan ini yang dimana dinilai kurang dalam pengetahuan dengan adanya 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak). Kebanyakan yang dapat dilihat adalah masyarakat yang masih kurang menganggap kalau memakai masker ini adalah hal yang penting. Kebanyakan masyarakat juga masih berkerumunan dan tidak memakai masker. Hal ini selalu di cegah dengan cara selalu mengingatkan masyarakat dalam bentuk apapun itu untuk selalu mematuhi protocol kesehatan, dan juga banyak dari aparat keamanan yang turut bekerja sama pada hal ini contohnya dengan mendenda apabila ada masyarakat yang tidak memakai masker.

PENUTUP

Dari rumusan masalah yang ada diatas yang dimana masyarakat dari berbagai bentuk partisipasi masyarakat menunjukkan kalau masyarakat masih mempunyai sifat sosial yang tinggi, masih adanya rasa kepedulian terhadap sesama dalam upaya pencegahan penularan Covid-19. Terbukti dengan dilihatnya beberapa tahapan partisipasi masyarakat Kabupaten Garut memberikan gambaran bahwa keikutsertaan mulai dari perencanaan sangat dibutuhkan sehingga nantinya bisa menikmati hasil yang dilakukan bersama. Dapat diketahui juga kalau dengan adanya

pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) masyarakat dengan tidak sadarnya harus mempunyai rasa disiplin yang tinggi juga untuk menjalankan PPKM ini. Perubahan perilaku masyarakat terhadap pengimplementasian PPKM ini terlihat dengan adanya antusias masyarakat yang sama-sama mau melaksanakan tahapan keempat tahapan yaitu (partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pengambilan manfaat). Perilaku masyarakat dengan adanya PPKM ini tentunya tidak semua direspon dengan positif, tidak banyak juga masyarakat Garut ini melalaikan protocol Kesehatan yang ada. Namun hal ini dapat dicegah tentunya dengan berbagai upaya dari pemerintah untuk selalu mengingatkan masyarakat tentunya dan juga denda yang didapat.

Dengan terlaksananya semua tahapan partisipasi masyarakat tersebut diharapkan bisa terhindar dari penyakit membuat virus corona serta dapat memperkecil adanya persentase penyebaran dan permasalahan Covid-19 juga saat ini masih belum terselesaikan. Selain adanya tahapan partisipasi tersebut juga adanya suatu keikutsertaan masyarakat Garut dalam aktivitas pencegahan penularan Covid-19 seperti ikut serta menyebarkan dengan cara sosialisasikan dari mulai dari media maupun memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakatnya langsung, memberikan bantuan secara sukarela dan inisiatif yang bisa menimbulkan rasa peduli sesama masyarakat, mengimplementasikan protokol kesehatan seperti dengan menggunakan masker pada saat keluar rumah dan menjaga jarak atau tidak berkumpul kerumunan di suatu tempat dan senantiasa bermukim di rumah. Inisiatif dan inovasi suatu masyarakat harus di kembangkan dan di dimanfaatkan oleh pemerintah agar penanganan Covid-

19 sejalan dengan kebijakan yang telah dilakukan dan masyarakat semakin sadar dan disiplin terhadap kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Geogra, F., & Gadjah, A. U. (2013). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali*. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Krisdiyanto, T. (2021). *Analisis Sentimen Opini Masyarakat Indonesia Terhadap Kebijakan PPKM pada Media Sosial Twitter Menggunakan Naïve Bayes Clasifiers*. *Jurnal CoreIT: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 7(1), 32–37. Retrieved from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/coreit/article/view/12945>
- Menulis, P. K. (2021). *Pre-print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021*. Pre-Print Kelas Menulis, 1–8.
- Nopriyono, & Suswanta. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. In JPK: *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*.
- Nabella Yunia, Gandakusumah, N. S. S., Zahra, N. S., Musdalifah, Fajrianti, F., Putra, H. D., Qunnisa, I. (2021). *Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap Covid-19 pada masa PPKM di Kelurahan Cibodasari*. *Panrannuangku Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 44–50. <https://doi.org/10.35877/panrannuangku487>
- Naheswari, N., & Duraiswamy, K. (2009). *PPKM: Preserving Privacy in Knowledge Management*. *International Business Research*, 2(2), 182–186. <https://doi.org/10.5539/ibr.v2n2p182>